



PEMERINTAH PROVINSI BALI

**NANGUN SAT KERTHI
LOKA BALI**

RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2026

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI**

Jl. Cikini II No. 3 Jakarta Pusat (10330)



Perwakilan.baliprov.go.id



(021) - 31925567



Badan Penghubung Provinsi Bali



Badan_penghubung_provinsi_bali



Badan Penghubung Provinsi Bali



b.penghubung.bali@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, Rancangan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2026 dapat disusun. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja SKPD ini mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain : RKPD Tahun 2026 dan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Badan Penghubung Provinsi Bali pada tanggal 27 Pebruari 2025, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat. Secara umum, Badan Penghubung Provinsi Bali telah dapat melaksanakan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Namun demikian mengingat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Badan Penghubung Provinsi Bali membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Jakarta, 15 Agustus 2025



KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

BALARIN EFENDI, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali.....	10
2.2 Analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali	17
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	24
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	24
3.2 Program Perangkat Daerah.....	51

3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali.....	58
	3.2.1 Tujuan.....	58
	3.2.2 Sasaran	59
3.4	Program dan Kegiatan.....	59
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	62
BAB V	P E N U T U P	63

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Capaian Kinerja Sasaran Renstra.....	10
TABEL 2	Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024	11
TABEL 3	Target dan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024	12
TABEL 4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun s.d 2024.....	13
TABEL 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung.....	17
TABEL 6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	18
TABEL 7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	22
TABEL 8	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Prov. Bali	27
TABEL 9	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali.....	33
TABEL 10	Keterkaitan Bidang Prioritas Pembangunan dengan 22 Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali.....	56
TABEL 11	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali 2026.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal.

Perencanaan pembangunan Provinsi Bali disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD dengan sebagian substansinya dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah

dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah, dengan sasaran: agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional. Dalam penyusunannya memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Penyelarasan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bahwa disamping RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prioritas pembangunan daerah menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap demikian juga program pembangunan daerah sebagai program strategis daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya, baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025- 2029, sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik melalui metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan.
2. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
3. Pendekatan politis memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana karena rakyat/pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas melalui penyelarasan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan.

5. Pendekatan holistik-tematik dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
6. Pendekatan integratif dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
7. Pendekatan spasial dengan mempertimbangkan dimensi ruang dalam perencanaan.

Sesuai dengan alur perencanaan Badan Penghubung selaku salah satu PD di Pemprov Bali saat ini membuat Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Rancangan RENJA PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Rancangan RENJA PD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis PD. Dengan demikian Rancangan RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai salah satu PD di Provinsi Bali memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu kota Negara yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta

kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja

Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2026 selaras dengan maksud dan tujuan RKPD Provinsi Bali 2026 dan Renstra PD yang telah dibuat berdasarkan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP).
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar seksi pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra Badan Penghubung, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, provinsi, tujuan dan sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali, program dan kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Memuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali yang terdiri dari 2 (dua) Program dan mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan.

Bab V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN LALU

**2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun
lalu dan capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali**

Pada Tahun 2024 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Renstra 2024-2026. Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Bali dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Propinsi Bali 2024-2026, yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Pelayanan Penghubung

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, yaitu :

A. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

TABEL 1

CAPAIAN KINERJA SASARAN RENSTRA

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi s.d Tahun 2024	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	89,83	90	89,83	99,81%

1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		90,59			
2. Pembinaan Masyarakat Bali di Jakarta		88,80			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		89,25			
4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		92,17			

B. Capaian Kinerja Program

Tabel 2
Target dan Capaian Kinerja ProgramTahun 2024

No	Program	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024
1	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	89,83
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi manajemen kinerja (Nilai LKjIP)	82	84,06 (Tahun 2023)

C. Capaian Kinerja Anggaran

Tabel 3
Target dan Capaian Kinerja Anggaran
Tahun 2024

No	Uraian	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Kinerja Anggaran	9.418.731.291,00	8.530.534.255,00

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024

Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Bali dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Propinsi Bali. Dari 2 (dua) program tersebut mengakomodir 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali, yaitu peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- 1 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga
- 2 Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya
- 3 Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta
- 4 Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali

Secara rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024 sudah melampaui target yaitu 89,83.

Tabel 4 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Badan Penghubung									
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat									
	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	89,83	90	89,83	99,81%	90	89,83	99,81%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	89,83	90	89,83	99,81%	90	89,83	99,81%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 Lap	100%

				Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82		82			82	82	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 lap	100%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen administrasi keuangan	18 orang 12 dok	18 orang 12 dok	18 orang 12 dok	16 orang 12 dok	88,88% 100%	18 orang- 12 dok	16 orang 12 dok	88,88% 12 dok
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapatrapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	100%	33 unit	33 unit	100%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Mempermudah koordinasi pemerintahan daerah ke pusat
2. Memberikan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
3. Melayani pimpinan daerah yang melaksanakan dinas ke Ibu Kota Jakarta
4. Sebagai sarana promosi dan informasi budaya dan pariwisata Bali di Jakarta
5. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari Wisma Badan Penghubung.

Sesuai dengan Tugas tersebut Badan Penghubung menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung dalam bentuk Renstra (Rencana Strategi) Badan Penghubung Provinsi Bali. Dalam pencapaian sasaran Rencana Strategi (Renstra) periode 2024-2026 yang dicerminkan dari perolehan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Indeks didapat dari kuesioner yang diberikan kepada semua penerima pelayanan, pelayanan yang dimaksud meliputi :

- Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum
- Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta

Tabel 5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan penerima pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	80	90	90	90	88,32	89,83	90	90	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali

Berikut ini isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi :

1. Belum optimalnya peran Badan Penghubung dalam upaya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat di Ibu Kota
2. Belum optimalnya koordinasi dan penyebaran promosi informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta
3. Belum optimalnya penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung yang memungkinkan dilaksanakan menggunakan CSR

4. Belum optimalnya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

Tabel 6 : Review terhadap Penetapan RKPD tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Badan Penghubung

No	Penetapan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan :	Jakarta	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79	7.410.769.232	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jakarta	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79	7.410.769.232	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	5.000.000	
	Sub kegiatan :					Sub kegiatan :					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	5.000.000	
b.	Administrasi Keuangan	Jakarta	Meningkatnya kualitas	100%	3.200.769.232	Administrasi Keuangan	Jakarta	Meningkatnya kualitas	100%	3.200.769.232	

	Perangkat Daerah		dokumen administrasi keuangan			Perangkat Daerah		dokumen administrasi keuangan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	15 PNS 4 PPPK	3.138.219.232	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	15 PNS 4 PPPK	3.138.219.232	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	62.550.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	62.550.000	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	325.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	325.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	60.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	90.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	90.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	2 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	2 paket	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	150.000.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	475.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	475.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor yang disediakan	33 unit	475.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor yang disediakan	33 unit	475.000.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.660.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.660.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	10.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	350.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	350.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 lap	1.300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12 lap	1.300.000.000	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	1.745.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	1.745.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	1.300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	1.300.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	3 unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	3 unit	300.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	8 unit	145.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	8 unit	145.000.000	
2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	85,60	3.076.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	85,60	3.076.000.000	
g	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	3.076.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	3.076.000.000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 lap	100.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 lap	100.000.000	
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni	12 lap	300.000.000	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan	12 lap	300.000.000	

			budaya					pelestarian seni budaya			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	12 lap	2.676.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	12 lap	2.676.000.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Penghubung Provinsi Bali pada tanggal 27 Pebruari 2025 melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk menerima masukan dari stakeholder terkait mengenai program dan kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan di Tahun 2026 sesuai dengan Tupoksi Badan Penghubung yaitu fungsi sebagai pembantu pemerintah daerah dalam tugas koordinasi di Ibu Kota Jakarta dan sebagai *show window* kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Bali terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada wisma Badan Penghubung Bali dan meningkatkan sarana promosi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Anjungan Daerah Bali TMII Jakarta. Adapun stakeholder Pemerintahan yang kami undang adalah :

1. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Bali;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
10. Sekretariat DPRD Provinsi Bali;
11. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali;
12. Kepala Biro Organisasi setda Provinsi Bali;

13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
14. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali;

Sedangkan stakeholder diluar pemerintah kami mengundang :

1. Direktur Utama TMII di Jakarta;
2. Ketua PHDI DKI Jakarta;
3. Ketua PSN DKI Jakarta;
4. Ketua SBI DKI Jakarta;
5. Ketua WHDI DKI Jakarta;
6. Ketua SDHD DKI Jakarta;
7. Pimpinan Sanggar Seni Se-jabodetabek;
8. Ketua KPSHD se-DKI Jakarta;
9. Ketua KMHDI DKI Jakarta.

Seluruh undangan kami undang online melalui link zoom. Ada banyak sekali masukan dan saran untuk Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali untuk Tahun 2026.

Tabel 7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mempromosikan tempat wisata yang hits di Bali melalui Anjungan Daerah Bali TMII	Jakarta	Kegiatan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali	Belum ditentukan	Usulan dari Masyarakat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali
2	Meningkatkan promosi terkait event kegiatan kebudayaan yang akan dilaksanakan di Bali melalui Anjungan Daerah Bali TMII	Jakarta	Kegiatan kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan Prosinsi Bali	Belum ditentukan	Usulan dari Masyarakat melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

3	Memberikan pembinaan terkait kesenian kepada seniman Bali yang ada di Jakarta	Jakarta	Terlaksananya pelatihan	1 kali	Usulan dari Sanggar Seni Tari Bali di Jakarta
4	Meningkatkan peran sanggar tari Bali untuk melakukan kegiatan pementasan kesenian di Anjungan Daerah Bali	Jakarta	kegiatan kolaborasi	belum ditentukan	Usulan dari Sanggar Kencana Indah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan membutuhkan strategi yang jelas, kebijakan yang tepat, serta program prioritas yang dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disusun untuk memastikan bahwa visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah dapat diwujudkan secara sistematis dan efektif.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah komprehensif yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Strategi ini berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah, serta meningkatkan daya saing Provinsi Bali dalam konteks pembangunan nasional dan global.

Untuk mengoperasionalkan strategi pembangunan, diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Selain itu, dalam RPJMD Semesta Berencana ini juga ditetapkan program prioritas pembangunan daerah yang mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menjawab kebutuhan pembangunan serta mengatasi berbagai isu

strategis yang dihadapi. Program prioritas ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pariwisata, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan jangka menengah merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam periode lima tahun. Strategi ini mencerminkan langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi pembangunan jangka menengah harus mampu menjawab berbagai isu strategis daerah, mengoptimalkan potensi lokal, serta memastikan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, strategi pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan berbasis kearifan lokal, serta percepatan transformasi digital dan ekonomi hijau. Dengan strategi yang tepat, Provinsi Bali dapat terus berkembang sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Dalam perumusannya, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali berlandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Berorientasi pada Hasil (Outcome-Based Development)

Strategi pembangunan harus mampu menghasilkan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

2. Berbasis Keunggulan Lokal dan Kearifan Budaya

Pembangunan di Bali harus tetap menjaga nilai-nilai budaya, adat, dan kearifan lokal sebagai identitas utama dalam membangun ekonomi, pariwisata, dan sektorlainnya.

3. Berdaya Saing dan Berbasis Inovasi

Strategi pembangunan harus mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk teknologi digital, ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi.

4. Berkeadilan dan Inklusif

Pembangunan harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Bali, termasuk daerah perkotaan dan perdesaan, serta kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

5. Berbasis Keberlanjutan dan Ketahanan Lingkungan

Pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan ekologi dengan menerapkan prinsip green economy, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

6. Adaptif terhadap Perubahan dan Tantangan Global

Strategi pembangunan harus mampu menjawab tantangan perubahan iklim, digitalisasi, disrupsi ekonomi, serta dinamika sosial-politik yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pembangunan di Provinsi Bali dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang luas bagi seluruh masyarakat.

Adapun strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Penguatan dan Pemajuan Adat serta Budaya Bali Berlandaskan Nilai-Nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai- Nilai Sad Kerthi	Memperkuat Pemahaman Krama Bali Terhadap Nilai-Nilai Sad Kerthi
		Meningkatkan keharmonisan umat beragama berdasarkan pemahaman Krama Bali terhadap Nilai-Nilai Sad Kerthi
	Meningkatnya peran Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Meningkatkan peran Desa Adat dalam pengelolaan sosial, budaya, dan ekonomi berbasis nilai-nilai Sad Kerthi.
	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Subak	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi subak
	Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali (Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci)	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra, dan budaya masyarakat
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan
		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan tradisional
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif
		Memperkuat Kurikulum yang Berbasis Kearifan Lokal
	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik
		Memperkuat dan memperluas pemanfaatan teknologi dalam pendidikan
	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman	Memperkuat kelembagaan dan tata Kelola Pendidikan Berbasis Pesraman
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berbasis Pesraman

	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi generasi muda Bali	Memperkuat Budaya Membaca dan Berpikir Kritis generasi Muda Bali
		Memfasilitasi pengembangan ekosistem yang mendukung eksplorasi potensi generasi muda Bali
		Memperkuat Kemampuan Numerasi Berbasis Kehidupan Sehari-hari
	Tercapainya peningkatan prestasi olahraga Provinsi Bali pada level nasional dan internasional	Memperkuat dukungan regulasi pemajuan olahraga
		Memperkuat sistem pembinaan olah raga jangka panjang
		Mengintegrasikan potensi olahraga dengan ekosistem pariwisata
	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja Krama Bali
	Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali.	Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan yang berkelanjutan
		Melindungi lahan-lahan pertanian untuk menahan laju perubahan fungsi lahan khususnya lahan pertanian produktif
		Mengeksplorasi lahan-lahan potensial untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif
		Menjaga potensi bahari
		Meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan
	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi	Memperkuat Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara Berkelanjutan
		Memperkuat Pengelolaan Aset Daerah untuk Peningkatan Pendapatan
	Meningkatnya Investasi Daerah Yang Mendorong Pemerataan Pembangunan di Bali	Memberikan Kepastian dan Keamanan Investasi Melalui Konsistensi Penegakan Regulasi
	Terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru berbasis potensi dan keunggulan lokal di desa-desa setiap Kabupaten/Kota di Bali.	Memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Desa
		Meningkatkan Daya Saing Global Produk Ekonomi Kreatif Desa

	Meningkatnya jumlah dan skala usaha UMKM dan koperasi yang berdaya saing	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, dan Daya Saing UMKM dan Koperasi yang Sehat dan Aktif
	Meningkatnya daya saing, kualitas, dan jangkauan pasar produk industri lokal Bali melalui standarisasi, sertifikasi, serta ekspansi ke pasar nasional dan internasional.	Meningkatkan Daya Saing dan Kapasitas Industri Lokal Bali
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Meningkatkan Standar Layanan dan Regulasi Pariwisata Berkelanjutan Memperluas Promosi Pariwisata Bali
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Memperkuat Infrastruktur Transportasi yang Modern dan Terintegrasi
		Menerapkan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
		Mengembangkan Transportasi Massal yang Efisien
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Mendorong Pemilahan Sampah dari Sumber
	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	Mengendalikan pemanfaatan ruang sekitar danau, mata air, sungai, dan laut.
	Meningkatnya cakupan luasan hutan lindung	Mengendalikan pemanfaatan ruang sekitar hutan
		Merevitalisasi dan memperluas vegetasi hutan
		Mengoptimalkan potensi wisata kawasan hutan untuk mendukung wisata berkelanjutan
	Meningkatnya sumber daya mineral	Mengoptimalkan Eksplorasi dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral
	Meningkatnya pemanfaatan energi yang berkelanjutan	Memperluas pemanfaatan sumber energi baru terbarukan
Tersedianya infrastruktur digital berkualitas yang inklusif dan merata di seluruh pelosok Provinsi Bali	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi di Masyarakat	Memperkuat Regulasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
		Memperkuat Infrastruktur Digital yang Merata dan Berkualitas
		Meningkatkan Literasi Digital bagi Masyarakat
		Meningkatkan Kolaborasi dan Inovasi dalam Digitalisasi Masyarakat
Terwujudnya Stabilitas dan Keamanan Masyarakat dan mitigasi	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Memperkuat Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam

		Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan
	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi
	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana terpadu	Meningkatkan Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Risiko Bencana
	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN
		Optimalisasi Sistem Meritokrasi dan Kinerja ASN
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Memperkuat Sistem Perencanaan dan Pelaporan Berbasis Kinerja
		Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Kinerja
	kualitas layanan publik Meningkatnya	Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik
		Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Layanan Publik

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat memiliki panduan yang jelas dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan pembangunan harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah, sejalan dengan kebijakan nasional dan regional, serta memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman, yaitu:

1. Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta akses terhadap layanan dasar yang lebih baik.

2. Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Daya Saing Global

Pengembangan sektor ekonomi unggulan Bali, seperti pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan ekonomi hijau, harus didorong agar memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional dan global.

3. Berkeadilan dan Inklusif

Arah kebijakan pembangunan harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan daerah tertinggal.

4. Berlandaskan Keberlanjutan dan Ketahanan Lingkungan

Pembangunan harus menerapkan konsep green economy, mengedepankan konservasi lingkungan, serta memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

5. Berbasis Inovasi dan Transformasi Digital

Kebijakan pembangunan harus mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk digitalisasi layanan publik, ekonomi berbasis teknologi, serta penguatan SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Pembangunan harus melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan akademisi, guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bali.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel ... berikut ini.

Tabel 9 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Serta Kearifan Lokal	Meningkatnya Penguatan dan Pemajuan Adat serta Budaya Bali Berlandaskan Nilai-Nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Memperkuat Pemahaman Krama Bali Terhadap Nilai-Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Meningkatkan sosialisasi <i>Sad Kerthi</i> pada kehidupan Krama Bali melalui Desa Adat						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Meningkatkan keharmonisan umat beragama berdasarkan pemahaman Krama Bali terhadap Nilai-Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> .						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya peran Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Meningkatkan peran Desa Adat dalam pengelolaan sosial, budaya, dan ekonomi berbasis nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i> .	Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Adat						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Subak		Memperkuat Kedudukan dan Kelembagaan Subak						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
			Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi subak	Meningkatkan Peran Subak dalam Ketahanan Pangan Daerah						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra, dan budaya masyarakat	Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali (<i>Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci</i>)								
Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan	Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Meningkatkan kualitas layanan kesehatan						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Meningkatkan kualitas layanan kesehatan tradisional	Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Mempercepat layanan kesehatan tradisional						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif	Meningkatkan akses, perluasan, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan formal dan nonformal.						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
				Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan.						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Memperkuat Kurikulum yang Berbasis Kearifan Lokal						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Menyediakan pendidikan berbasis vokasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik	Menyediakan pelatihan dan peningkatan kapasitas guru berbasis teknologi dan pedagogi modern.						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Memperkuat dan memperluas pemanfaatan teknologi dalam pendidikan	Memastikan semua sekolah memiliki akses internet dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran daring dan hybrid.						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman	Memperkuat kelembagaan dan tata Kelola Pendidikan Berbasis Pesraman	Memperkuat Regulasi Daerah untuk Pendidikan berbasis Pesraman						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berbasis Pesraman	Membangun dan merevitalisasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis Pesraman secara merata dan proporsional						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Memperkuat Budaya Membaca dan Berpikir Kritis generasi Muda Bali	Menyiapkan generasi muda untuk berperan aktif sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi generasi muda Bali	Memfasilitasi pengembangan ekosistem yang mendukung eksplorasi potensi generasi muda Bali	Menyiapkan wahana/ekosistem untuk mengembangkan potensi generasi muda						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Memperkuat Kemampuan Numerasi Berbasis Kehidupan Sehari-hari	Menciptakan kesempatan kerja yang inklusif bagi generasi muda						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Tercapainya peningkatan prestasi olahraga Provinsi Bali	Memajukan olahraga pendidikan, olahraga						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
		pada level nasional dan internasional	pemajuan olahraga	masyarakat, dan olahraga prestasi.						
			Memperkuat sistem pembinaan olah raga jangka panjang	Meningkatkan pencapaian olahraga prestasi dalam ajang nasional dan internasional						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Mengintegrasikan potensi olahraga dengan ekosistem pariwisata	Mengembangkan olahraga sebagai bagian dari strategi pariwisata/pariwisata berbasis olahraga (<i>sport tourism</i>)						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	Membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok difabel						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Meningkatkan daya saing tenaga kerja Krama Bali	Memberi perlindungan tenaga kerja Krama Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja Krama Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja Krama Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian,	Meningkatnya Laju		Meningkatkan produksi	Menuntaskan sistem pertanian organik						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata	Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali.	Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan	pertanian dan perikanan yang berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Melindungi lahan-lahan pertanian untuk menahan laju perubahan fungsi lahan khususnya lahan pertanian produktif	Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan melarang alih fungsi lahan sawah						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Mengeksplorasi lahan-lahan potensial untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif	Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Menjaga potensi bahari	Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan						Seluruh Kabupaten dan Kota kecuali Bangli
			Meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan	Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
		Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi	Memperkuat Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Mengembangkan ekosistem inovasi yang mendukung kerja sama akademisi, industri, dan pemerintah						Denpasar, Buleleng, Badung, Jembrana
				Meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi						Denpasar, Buleleng, Badung, Jembrana
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara Berkelanjutan	Meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk pendirian beberapa BUMD sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah.						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Memperkuat Pengelolaan Aset Daerah untuk Peningkatan Pendapatan	Mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif menjadi sumber pendapatan baru.						Seluruh Kabupaten dan Kota
	Meningkatnya Investasi Daerah Yang Mendorong Pemerataan Pembangunan di Bali		Memberikan Kepastian dan Keamanan Investasi Melalui Konsistensi Penegakan Regulasi	Memperkuat Penegakan, dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Berkaitan Langsung Terhadap Investasi						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
	Terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru berbasis potensi dan keunggulan lokal di desa-desa setiap Kabupaten/Kota di Bali.		Memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Desa	Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali						Denpasar, Badung, Gianyar
			Meningkatkan Daya Saing Global Produk Ekonomi Kreatif Desa	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital						Denpasar, Badung, Gianyar
				Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital						Denpasar, Badung, Gianyar
				Menjadikan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai penopang utama perekonomian Bali						Denpasar, Badung, Gianyar
	Meningkatnya jumlah dan skala usaha UMKM dan koperasi yang berdaya saing		Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, dan Daya Saing UMKM dan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk UMKM dan Koperasi						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk UMKM dan Koperasi						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai penopang utama perekonomian Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
		Meningkatnya daya saing, kualitas, dan jangkauan pasar produk industri lokal Bali melalui standarisasi, sertifikasi, serta ekspansi ke pasar nasional dan internasional.	Meningkatkan Daya Saing dan Kapasitas Industri Lokal Bali	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk industri lokal Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk industri lokal Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Menjadikan produk industri lokal Bali sebagai penopang utama perekonomian Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Meningkatkan Standar Layanan dan Regulasi Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing pariwisata Bali						Denpasar, Badung, Gianyar
			Memperluas Promosi Pariwisata Bali	Meningkatkan dan perluasan promosi pariwisata Bali ditingkat nasional dan internasional						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Menjadikan Pariwisata sebagai penopang perekonomian Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
Infrastruktur Darat, Laut, dan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Memperkuat Infrastruktur Transportasi yang	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar Kota/Kabupaten se-Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
Udara serta Transportasi	infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru		Modern dan Terintegrasi	Membangun infrastruktur jalan baru yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten se-Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Membangun/mengembangkan pelabuhan/dermaga Bali timur, Bali utara, Bali barat, dan Bali selatan						Karangasem, Klungkung, Buleleng,
				Mengembangkan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai						Badung
				Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Menerapkan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Membangun sarana transportasi ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah padat penduduk dan pariwisata Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan						Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan
			Mengembangkan Transportasi Massal yang Efisien	Menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan Pusat perekonomian						Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Mendorong Pemilahan Sampah dari Sumber	Menjadikan Bali sebagai Pulau bebas sampah plastik sekali pakai						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Membudayakan pengelolaan sampah berbasis Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	Mengendalikan pemanfaatan ruang sekitar danau, mata air, sungai, dan laut.	Membudayakan perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut secara Niskala – Sakala						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya cakupan luasan hutan lindung	Mengendalikan pemanfaatan ruang sekitar hutan	Melindungi dan merawat hutan di seluruh wilayah Bali						Jembrana, Buleleng, Karangaem, Bangli, Tabanan, dan Badung
			Merevitalisasi vegetasi hutan	Intensifikasi vegetasi hutan melalui penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara Bali						Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, Tabanan, dan Badung
			Mengoptimalkan potensi wisata kawasan hutan untuk mendukung wisata berkelanjutan	Memberdayakan kawasan hutan sebagai destinasi ekowisata						Jembrana, Buleleng, Karangaem, Bangli, Tabanan, dan Badung

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
		Meningkatnya sumber daya mineral	Mengoptimalkan Eksplorasi dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral	Mengembangkan pemetaan geologi dan eksplorasi mineral berbasis teknologi modern, seperti pemetaan geospasial dan sistem informasi geografis (GIS).						Karangasem
		Meningkatnya pemanfaatan energi yang berkelanjutan	Memperluas pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Menjadikan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT)						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Mempercepat penurunan emisi karbon dalam rangka pencapaian Net Zero Emission (NZE)						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Menjadikan Bali bebas dari polusi untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/Net Zero Emission (NZE)						Seluruh Kabupaten dan Kota
Bali Digital Keamanan Digital	Pulau dan Tersedianya infrastruktur digital berkualitas yang inklusif dan merata di	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi di Masyarakat	Memperkuat Regulasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
	seluruh pelosok Provinsi Bali		Memperkuat Infrastruktur Digital yang Merata dan Berkualitas	Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Meningkatkan Literasi Digital bagi Masyarakat	Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Meningkatkan Kolaborasi dan Inovasi dalam Digitalisasi Masyarakat	Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
	Terwujudnya Stabilitas dan Keamanan Masyarakat dan mitigasi	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Memperkuat Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
				pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian						
				Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan	Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
				Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi	Meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui program diskusi publik, seminar, dan simulasi pemilu di sekolah dan kampus.						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana terpadu	Meningkatkan Sistem Peringatan Dini dan	Meningkatkan Sistem Manajemen Risiko Bencana Berbasis Data						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
	Meningkatnya kualitas tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Manajemen Risiko Bencana	Memperkuat Lembaga dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN	Memastikan sistem pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi dan <i>talent pool</i> .						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Optimalisasi Sistem Meritokrasi dan Kinerja ASN	Meningkatkan sistem evaluasi kinerja ASN berbasis <i>outcome</i> dan teknologi digital.						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Memperkuat Sistem Perencanaan dan Pelaporan Berbasis Kinerja	Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis kinerja.						Seluruh Kabupaten dan Kota
			Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Kinerja	Menerapkan e-Monitoring dan e-Evaluasi untuk mengawasi efektivitas program pembangunan daerah.						Seluruh Kabupaten dan Kota
		Meningkatnya kualitas layanan publik	Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik	Mendorong inovasi teknologi AI dan <i>big data</i> dalam analisis serta pengelolaan layanan publik.						Seluruh Kabupaten dan Kota

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kabupaten/Kota)
					Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
			Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Layanan Publik	Memastikan budaya kerja ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.						Seluruh Kabupaten dan Kota

Program prioritas daerah adalah serangkaian program pembangunan yang memiliki dampak strategis dan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Bali dalam periode RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan utama pembangunan daerah, mendorong percepatan pencapaian sasaran strategis, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara lebih efektif dan terarah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, program prioritas daerah disusun berdasarkan isu strategis daerah, potensi unggulan, serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan sinkronisasi dengan kebijakan nasional, seperti RPJMN 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2045.

Program prioritas daerah dalam RPJMD Semesta Berencana ini tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan, guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bali.

Penetapan program prioritas daerah bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pembangunan yang terarah dan berdampak luas dengan mengutamakan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah, dengan mengalokasikan sumber daya pada program yang memiliki daya ungkit tinggi bagi pembangunan daerah.
3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

4. Menjamin kesinambungan pembangunan yang selaras dengan kearifan lokal dan mempertahankan identitas budaya Bali dalam menghadapi perubahan zaman.
5. Mempercepat pencapaian target pembangunan daerah dengan mengedepankan pendekatan berbasis data dan inovasi.

Dengan adanya program prioritas yang jelas dan terarah, pembangunan daerah dapat lebih fokus dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Bali.

Arah pelaksanaan pembangunan Provinsi Bali dalam jangka menengah melalui penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah yang terencana, terukur, dan terintegrasi, guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2025–2029. Penyusunan program pembangunan daerah ini diarahkan untuk:

- Mewujudkan enam bidang prioritas pembangunan Bali yang berfokus pada pelestarian alam, peningkatan kualitas manusia, pemajuan kebudayaan, penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi kerthi Bali, serta pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan,
- Menjamin konsistensi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan program,
- Memastikan keterpaduan antara RPJMD Provinsi, Renstra Perangkat Daerah, dan RKP Daerah (RKPD).

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dalam:

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Bali yang bersifat lintas sektor dan strategis,
- Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah,

- Keterhubungan antara kinerja sektoral perangkat daerah dengan upaya pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi Bali.

Penekanan pembangunan lima tahun ke depan adalah pada penguatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, pelayanan publik prima, dan transformasi digital berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bali. Melalui perencanaan dan pelaksanaan program prioritas perangkat daerah secara sistematis dan terpadu, diharapkan pembangunan Bali tidak hanya terarah dan terukur, tetapi juga berkelanjutan, berkeadilan, dan selaras dengan filosofi kehidupan Bali yang harmonis: Tri Hita Karana dan Sad Kerthi.

3.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, dengan berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta berorientasi pada hasil (outcome-based approach).

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, program perangkat daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang harus selaras dengan dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP). Dengan demikian, program perangkat daerah menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan pembangunan yang efektif dan berbasis kinerja.

Program perangkat daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan tujuan untuk:

1. Mewujudkan Sinergi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan
Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan berdampak nyata.
2. Memastikan Penggunaan Anggaran yang Efektif dan Berbasis Kinerja
Mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan dan prinsip value for money, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga pencapaian program dapat dievaluasi secara berkala.
4. Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Mengembangkan program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup.
5. Mendukung Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik
Mendorong program perangkat daerah yang mengintegrasikan teknologi digital dan smart governance, guna mempercepat reformasi birokrasi dan efisiensi layanan.
6. Menjaga Keberlanjutan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal
Menyelenggarakan program yang mendukung pelestarian adat, budaya, dan lingkungan hidup sebagai bagian dari konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Dengan adanya program perangkat daerah yang terstruktur dan berbasis kinerja, diharapkan pembangunan Provinsi Bali dalam lima tahun ke depan

dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 - 2030 ditetapkan ke dalam 6 (enam) Bidang Prioritas Pembangunan Bali yaitu :

Prioritas 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Serta Kearifan Lokal

Prioritas 2 : Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 3 : Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata

Prioritas 4 : Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi

Prioritas 5 : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi

Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Digital

Dengan memperhatikan arahan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, demi menjaga kekuatan unteng Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, maka visi pembangunan Bali 5 Tahun ke-Depan, periode 2025-2030, yaitu :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU”

Yang bermakna; “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala - Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam

Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Visi ini juga mengandung makna; “Membangun Kehidupan Krama Bali yang Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban Berlandaskan Nilai – Nilai Luhur Kearifan Bali”.

Memantapkan dan mempercepat pewujudan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dilaksanakan melalui 22 (dua puluh dua) Misi Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai strategi untuk menjaga, memperkuat, dan memajukan Alam, Manusia, serta Kebudayaan Bali. Adapun Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Misi 1.** Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala- Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.
- Misi 2.** Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
- Misi 3.** Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, senibudaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.
- Misi 4.** Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.
- Misi 5.** Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas:

bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.

- Misi 6.** Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.
- Misi 7.** Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
- Misi 8.** Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalyaya dan Pasraman di Desa Adat.
- Misi 9.** Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali
- Misi 10.** Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional
- Misi 11.** Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali
- Misi 12.** Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali.
- Misi 13.** Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali.
- Misi 14.** Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.

- Misi 15.** Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.
- Misi 16.** Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.
- Misi 17.** Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.
- Misi 18.** Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan
- Misi 19.** Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.
- Misi 20.** Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
- Misi 21.** Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.
- Misi 22.** Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.

Visi dan 22 misi pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 telah dirancang secara menyeluruh dan diselaraskan ke dalam 6 Bidang Prioritas Strategis yang mencerminkan upaya terpadu dalam menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Tabel 10 Keterkaitan Bidang Prioritas Pembangunan dengan 22 Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali

Bidang Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029		Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029	
Bidang 1.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.	Misi 1	Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> , yaitu: <i>Atma Kerthi</i> , <i>Segara Kerthi</i> , <i>Danu Kerthi</i> , <i>Wana Kerthi</i> , <i>Jana Kerthi</i> , dan <i>Jagat Kerthi</i> .

Bidang Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029		Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029	
		Misi 2	Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi <i>Parahyangan</i> , <i>Pawongan</i> , dan <i>Palemahan</i> .
		Misi 3	Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.
Bidang 2. Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.		Misi 4	Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.
		Misi 5	Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.
		Misi 6	Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.
		Misi 7	Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
		Misi 8	Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk <i>Widyalaya</i> dan <i>Pasraman</i> di Desa Adat.
		Misi 9	Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali
		Misi 10	Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional
		Misi 11	Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali
Bidang 3. Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata.		Misi 12	Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali.
		Misi 13	Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali.
		Misi 14	Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.

Bidang Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029		Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029	
		Misi 15	Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi
		Misi 17	Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat
Bidang 4.	Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi.	Misi 18	Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan
Bidang 5.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.	Misi 19	Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.
		Misi 20	Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
Bidang 6.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.	Misi 16	Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.
		Misi 21	Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.
		Misi 22	Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali

Menunjuk pada RPJMD Provinsi Bali 2025-2029, dan Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025-2029 maka telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai perangkat daerah untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

3.2.1 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah :

- Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
- Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

- Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
- Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

3.2.2 Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali.

Tabel 11 :

Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Target 2026
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	85,60

3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali di Tahun 2026 telah ditetapkan 2 (dua) program dan mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2019, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG, dengan kegiatan:

a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
- Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Jumlah program yang direncanakan pada Rancangan Renja Tahun 2026 secara keseluruhan adalah 2 (dua) program dengan total 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp.10.486.769.232,00,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam tabel berikut : Terlampir Renja Tahun 2026

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali yang didalamnya mencakup penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat digunakan sebagai pedoman serta acuan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak serta ketersediaan anggaran. Adanya renja ini diharapkan agar Badan Penghubung Provinsi Bali serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u>
	KEPALA BADAN
	Arifin Efendi, ST., MT
	NIP. 19710714 200003 1 003

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN 2026																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGHUBUNG						10.486.769.232,00							13.187.500.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						10.486.769.232,00							13.187.500.000,00	
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						10.486.769.232,00							13.187.500.000,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Badan Penghubung)	-			82 Nilai	7.410.769.232,00						-	8.777.500.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi]	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84.5	82	0	82.5	7.410.769.232,00	-	-	-	-	-	-	8.777.500.000,00	-
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	5.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	12.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		12.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	-			100 persen	3.200.769.232,00			-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	3.570.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/ Bulan	3.138.219.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	62.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah jenis penyediaan pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor</i>	-			5 jenis	325.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	-	457.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		85.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		120.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		17.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah unit pengadaan BMD yang menunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	-			30 Unit	475.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sub kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	-			3 Jenis	1.660.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	-	2.012.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		12.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		1.500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan pemeliharaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			3 Jenis	1.745.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	-	2.175.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		1.500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		175.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	-			90 Indeks	3.076.000.000,00						-	4.410.000.000,00	
		[Meningkatkan Pelayanan Penghubung]	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	0	90	3.076.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.410.000.000,00	-
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	<i>Jenis sub kegiatan pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung</i>	-			3 sub kegiatan	3.076.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	4.410.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		110.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya</i>				12 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</i>				12 Laporan	2.676.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		3.750.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	J U M L A H							10.486.769.232,00							13.187.500.000,00	